

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan usaha yang meliputi perubahan pada berbagai aspek termasuk di dalamnya struktur sosial, sikap masyarakat, serta institusi nasional dan mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang baik. Menurut Martono (2008), proses pembangunan secara filosofis dapat diartikan sebagai upaya sistematis dan berkesinambungan. Proses ini bertujuan menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif untuk pencapaian aspirasi masyarakat. Pembangunan juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Pembangunan ekonomi juga merupakan usaha menambah modal atau pengetahuan agar satu sama lainnya membawa pendapatan per kapita yang lebih besar.

Pembangunan nasional terbagi dalam dua sektor, yaitu pembangunan sektor perekonomian dan sektor non perekonomian. Pada sektor perekonomian terbagi menjadi sembilan sektor, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan galian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa. Pada sektor non perekonomian terbagi menjadi sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor budaya dan sektor politik yang dapat pula menyumbang pembangunan perekonomian negara. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang nyata dalam pembentukan PDB Nasional (Arsyad, 2009).

Pembangunan pertanian dapat berjalan dengan adanya lima syarat pokok, namun percepatan pembangunan pertanian diperlukan dukungan faktor-faktor pelancar yang berhubungan dengan geraknya sumber daya manusia dan pendayagunaan sumber daya alam secara optimal agar mencapai produktivitas yang tinggi serta mencapai tujuan pembangunan secara jelas dan terfokus. Suatu pembangunan tidak akan terlepas dari faktor-faktor penunjang, beberapa faktor penunjang atau syarat pokok dalam pembangunan yaitu tersedianya pasar untuk hasil usaha tani, teknologi yang senantiasa berkembang, tersedianya bahan dan

alat produksi secara lokal, adanya perangsang produksi bagi petani, dan tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu (Mosher, 2001:77).

Sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar yaitu sekitar 13,45 persen pada tahun 2019 atau merupakan urutan kedua setelah sektor Industri Pengolahan 19,62 persen. Pada waktu krisis ekonomi, sektor pertanian merupakan sektor yang cukup kuat menghadapi goncangan ekonomi dan ternyata dapat diandalkan dalam pemulihan perekonomian nasional (Statistik Kelapa Sawit Indonesia, 2019)

Kontribusi subsektor perkebunan terhadap sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar yang berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan yaitu terjadi pada tahun 2012-2016 (Lampiran 1). Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDB pertanian tahun 2012 sebesar 28,06, dan menurun menjadi 25,74% pada tahun 2016. Rata-rata kontribusi sektor perkebunan terhadap PDB pertanian yaitu 27,24%. Subsektor lain yang mengalami peningkatan yaitu peternakan dengan rata-rata sebesar 11,73% dan subsektor perikanan dengan rata-rata sebesar 17,50% (Fajar dan Alfiyani, 20118)

Perkebunan merupakan salah satu subsektor pertanian yang memiliki peran strategis yang berpengaruh dalam peningkatan devisa negara, salah satu yang menjadi andalan adalah tanaman kelapa sawit. Di tahun 2017 kelapa sawit memiliki volume 29.135.179 ton dengan nilai ekspor mencapai US\$20,802 milyar. Dengan meningkatnya kontribusi perkebunan terhadap perekonomian nasional diharapkan mampu memperkokoh pembangunan secara menyeluruh (Direktorat Jendral Perkebunan, 2018:8).

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan sub sektor perkebunan di Indonesia. Komoditas yang satu ini memiliki pamor yang cemerlang, karena membawa janji sebagai energi zaman baru, *biofuel*. Indonesia adalah negara produsen sekaligus pengeksport minyak kelapa sawit mentah terbesar di dunia. Pada tahun 2017 Indonesia menghasilkan 29 juta ton minyak sawit mentah atau hampir separuh total produksi dunia (Ditjebun, 2018).

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia berdasarkan kepemilikan terbagi atas Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PBN), Perkebunan

Besar Swasta (PBS). Perkebunan sawit di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik luas areal maupun produksi minyak. Luas perkebunan kelapa sawit rakyat tahun 2013 adalah 4.356.087 ha menjadi 5.697.892 ha pada tahun 2017. Produksi perkebunan rakyat tahun 2013 10.010.728 ton menjadi 34.940.000 ton pada tahun 2017, dan jumlah produksi pada tahun 2018 sebanyak 42.883.500 ton dan 2019 sebesar 45.861,100 (Lampiran 2). (Statistik kelapa sawit Indonesia, 2019)

Untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi di sektor perkebunan yang berbasis ekonomi kerakyatan, maka pemerintah membentuk program kemitraan sebagai bentuk kerja sama antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar kebun. Penguatan pola kemitraan ini diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 33/Permentan/OT.104/7/2006/ tentang Revitalisasi Perkebunan. Kehadiran program revitalisasi perkebunan ini mewajibkan perusahaan perkebunan melaksanakan program kemitraan yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, salah satu mitra perusahaan adalah koperasi.

Menurut Baga (2005:43) peran koperasi pertanian menjadi penting dalam meningkatkan produksi serta kesejahteraan kehidupan petani, dimana:

- a. Melalui koperasi petani dapat memperbaiki posisi rebut tawar mereka baik dalam memasarkan hasil produksi maupun dalam pengadaan input produksi yang dibutuhkan. Posisi rebut tawar (bargaining power) dari berbagai ketidakadilan pasar yang dihadapi petani.
- b. Dalam hal mekanisme pasar yang tidak menjamin terciptanya keadilan, koperasi dapat mengupayakan pembukaan pasar baru bagi produk anggotanya. Pada sisi lain koperasi dapat memberikan akses kepada anggotanya terhadap berbagai penggunaan faktor produksi dan jasa yang tidak ditawarkan pasar.
- c. Dengan bergabung dalam koperasi, para petani dapat lebih mudah melakukan penyesuaian produksinya melalui pengolahan pasca panen sehubungan dengan perubahan permintaan pasar. Pada gilirannya hal ini akan memperbaiki efisiensi pemasaran yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, dan bahkan kepada masyarakat umum maupun perekonomian nasional.

- d. Dengan penyatuan sumberdaya para petani dalam sebuah koperasi, para petani lebih mudah dalam menangani resiko yang melekat pada produksi pertanian, seperti: pengaruh iklim, heterogenitas kualitas produksi dan sebaran daerah produksi.
- e. Dalam wadah organisasi koperasi, para petani lebih mudah berinteraksi secara positif terkait dalam proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas SDM mereka. Koperasi sendiri memiliki misi khusus dalam pendidikan bagi anggotanya.
- f. Berdirinya koperasi sekaligus membuka lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi para petani anggota maupun masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan Inpres No.2 /1978 Koperasi Unit Desa (KUD) ditetapkan menjadi pusat/pelopor perekonomian pedesaan. Pemerintah melalui lembaga KUD berusaha untuk menyediakan sarana produksi pertanian dengan harga yang layak dan tidak terlalu menyulitkan bagi petani. Disamping itu juga menyediakan kredit dengan bunga rendah dan dengan persyaratan yang mudah, melakukan penyuluhan-penyuluhan (Anoraga dan Widyanti, 2007:168).

Tugas KUD adalah melayani petani, agar usahatani yang dimiliki lebih baik, selain dari pada itu dalam melaksanakan tugasnya KUD harus benar-benar mementingkan pelayanan kepada anggotanya dan masyarakat, dan menghindari kegiatan yang menyaingi anggota sendiri. Pembinaan dan pengembangan KUD sebagai organisasi petani yang kuat memerlukan partisipasi dari masyarakat dan sekitarnya, maka partisipasi masyarakat dalam menimbulkan dan mengembangkan KUD menjadi syarat mutlak. Koperasi Unit Desa (KUD) pada umumnya selalu bertindak untuk melindungi produsermya terutama yang berekonomi lemah, yang menjadi anggota koperasinya. Selanjutnya KUD atau koperasi pada umumnya memberikan jasa agar para anggotanya dengan mudah mendapatkan barang-barang yang diperlukan dari para produsen yang ekonominya kuat (toko-toko, agen dan lain-lainnya sebagainya), baik barang-barang untuk keperluan produksi maupun barang-barang kebutuhan hidup, dengan harga layak yang dapat dijangkau oleh para anggota koperasi yang bersangkutan (Kartasapoetra, 2006).

B. Rumusan Masalah

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki berbagai komoditi perkebunan, salah satunya adalah kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan komoditi dengan jumlah terbesar pada sektor perkebunan. Luas lahan perkebunan kelapa sawit dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami perkembangan setiap tahunnya (Tabel 1). Diketahui luas 182.153,0 ha menjadi 220.193,1 ha. luas lahan perkebunan kelapa sawit tentunya mempengaruhi jumlah produksi kelapa sawit. Pada tahun 2014 jumlah produksi 466.424,9 ton pada tahun 2018 mencapai 568.680,4 ton. Jumlah petani kelapa sawit juga mengalami peningkatan dari tahun 2014 berjumlah 111.746 ton pada tahun 2018 meningkat menjadi 183.898 ton (BPS Sumbar, 2019)

Tabel 1. Luas Areal dan Produksi Tanaman Kelapa Sawit di Sumatera Barat Tahun 2019

Tahun	Luas Areal (ha)				Jumlah produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
	TBM	TM	TR	Jumlah		
2014	155.413,1	37.927,0	98,0	192.153,0	466.424,9	3.001,2
2015	158.333,1	35.511,0	244,0	194.088,0	459.793,5	2.904,0
2016	169.199,7	39.238,9	3.320,3	211.758,0	504.054,8	2.979,1
2017	166.266,7	40.711,3	6.109,3	213.087,0	483.012,6	2.905,1
2018	182.861,5	24.559,0	12.732,6	220.193,1	568.680,4	3.109,9

Sumber : BPS Sumatera Barat, 2019

Keterangan :

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

TR : Tanaman Rusak

Di Sumatera Barat ada beberapa Kabupaten penghasil komoditi kelapa sawit, salah satunya adalah Kabupaten Dharmasraya. Dharmasraya adalah salah satu kabupaten yang memiliki bermacam komoditi perkebunan, kelapa sawit merupakan komoditi terbesar nomor dua (Lampiran 3). Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Dharmasraya bekerja sebagai petani perkebunan kelapa sawit.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat dikerjakan dan dikembangkan melalui pola Perekebunan Inti Rakyat (PIR), yaitu perusahaan melakukan kerja sama bermitra dengan Koperasi petani yaitu KUD. Di Sumatera Barat, PIR-Bun pertama kali dilakukan di Pasaman Barat tahun 1983, dan PIRTrans di Dharmasraya tahun 1986 yang dilanjutkan dengan PIR-KKPA tahun 1992 dan PIR-ABA pada tahun 2000an. Dengan demikian koperasi petani sawit telah ada sejak tahun 1980an di Sumatera Barat (Syarfi, 2007). Dengan demikian pada periode 2010an perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat umumnya sudah masuk para periode peremajaan (Syarfi dkk, 2016)

Pada pola PIR kemitraan perusahaan dengan petani pekebun sawit melalui lembaga Koperasi. Semenjak kredit pembangunan perkebunan kelapa sawit sudah dilunasi petani, umumnya petani tidak aktif lagi sebagai anggota koperasi dan peran koperasi mulai menurun. Sementara untuk memperoleh bantuan dana peremajaan melalui BPDPKS petani harus berkelompok atau berkoperasi. Permasalahan peremajaan kelapa sawit perkebunan rakyat menjadi perhatian utama pemerintah dan asosiasi petani kelapa sawit. (Syarfi dkk, 2019 dan 2019b).

Peran Koperasi Unit Desa (KUD) berfungsi dalam penyediaan atau penyaluran sarana-sarana produksi dan pemasaran hasil-hasil produksi TBS. Peranan KUD akhir-akhir ini mengalami penurunan dengan semakin tuanya tanaman-tanaman dan terbatasnya kemampuan pendanaan KUD untuk membantu biaya peremajaan tanaman yang sudah tua. Oleh sebab itu dibutuhkan bantuan peremajaan oleh pemerintah melalui program Peremajaan Sawit Rakyat-PSR (BPDPKS, 2019)

Koperasi di Kabupaten Dharmasraya Pada tahun 2017 berjumlah 201 dengan jumlah KUD sebanyak 50 (Lampiran 4). Salah satu KUD yang ada di Dharmasraya dalah KUD Koto Salak, yang bermitra dengan PT Transco Pratama dalam membangun perkebunan kelapa sawit anggota koperasi. KUD Koto Salak memiliki 12 kelompok tani, yang beranggotakan sebanyak 228 orang . Luas areal lahan perkebunan kelapa sawit anggota kelompok tani KUD Koto Salak adalah 544 ha. Produksi TBS sebanyak 7.398,95 ton (Lampiran 5). Setelah tanaman dikonversi tanaman diserahkan pengelolaanya kepada KUD dibawa pengawasan PT inti. Pada tahun 2006 kredit KKPA sudah lunas, dan Kelapa sawit rakyat

dikelola sepenuhnya oleh KUD. sekarang kelapa sawit sudah memasuki usia replanting, dan akan melaksanakan replanting semuanya diusahakan oleh KUD

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka peneliti merasa perlu untuk meneliti “Peran KUD Koto Salak dalam mengusahakan perkebunan kelapa sawit rakyat di Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya.

Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran KUD Koto Salak dalam usaha perkebunan kelapa sawit anggota?
2. Bagaimana peran KUD Koto Salak dalam peremajaan perkebunan kelapa sawit anggota?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis peran KUD Koto Salak terhadap anggota yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit
2. Untuk mengetahui peran KUD Koto Salak dalam perencanaan dan pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi KUD Kota Solak

Sebagai bahan informasi mengenai sejauh mana peranan Koperasi dalam usaha perkebunan kelapa sawit rakyat.

2. Bagi Para Akademisi

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan peran koperasi dalam usaha perkebunan rakyat/anggotanya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberikan sumbangan wawasan dan dapat mengembangkan literatur-literatur koperasi yang sudah ada terhadap penelitian koperasi yang berhubungan dengan peran koperasi dalam usaha perkebunan sawit rakyat.

